

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Junaedi Karso. (2022). Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Bambang Waluyo. (2002). *Implementasi Kebijakan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno. (2014). *Kebijakan Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen. (2007). *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.
- Hawari D. (2016). *Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi*. Jakarta: Balai penerbit FKUI
- Herlina. (2019). *Hukum Dan Etika Profesi Bidan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ikatan Bidan Indonesia. (2023). *Kode Etik Bidan Indonesia*. Jakarta: IBI Pusat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maria Farida Indrati S. (2020). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nelvitia Purba, Mukidi, dan Sri Rizki Hayaty. (2022). *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Serang: CV. AA Rizky.
- Notoadmodjo, S. (2012). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoadmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon. (2007). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ridwan HR. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekidjo Notoatmodjo (2018). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, Rineka Cipta,

Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suharto. (2018). *Kebijakan Publik Dan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Niar, et al. (2023). *Konsep Kebidanan*. Purbalingga: Eurika Media Aksara.

World Health Organization (WHO), (1946). *Constitution of the World Health Organization*

World Health Organization. (2020). *Global Strategy On Human Resources For Health*. Geneva: WHO Press.

JURNAL

Aditia Arief Firmanto. (2019). hukum pasien pada bidan praktik mandiri di Indonesia pasca Undang-Undang Kebidanan. *Pranata Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.80>

Alfarizi, L. M. et al. (2022). Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelalaian Apoteker Dalam Memberikan Resep Obat Pada Pelayanan Kesehatan. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(1)

Anisa M, P. N., Wijayanti, E., & Bungin, S. S. (2024). Tanggung jawab hukum bidan praktik mandiri pada kasus rujukan kegawat daruratan kebidanan. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(5), 849–856. <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i5.492>

Astuti, R., & Savitri, A. M. (2025). Comparison of legal protection for midwives in carrying out their professional practices before and after the enforcement of

- Law Number 17 of 2023 concerning health. *Humaniorum Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.76>
- Asyah, N. (2024). The legal protection for midwives providing drug services to patients in midwifery practice in remote areas. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 3(2), 82–92. <https://doi.org/10.30649/jhek.v3i2.122>
- Attriani, A. N. (2022). Tantangan dan Isu Strategis Sumber Daya Kesehatan Manusia Pada Puskesmas di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(3)
- Azhar, M. et al. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. *Law, Development and Justice Review*, 6(1)
- Belantar, M. O. D. S., and Yeni Triana. (2024). "Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1)
- Bilqis, M. (2023). Tantangan Sistem Kesehatan Nasional: Distribusi dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia.
- Burso, A. (2018). Aspek hukum persetujuan tindakan medis (inform consent). *Law & Justice Journal*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
- Chotimah, S. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia. *Jurnal Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan*, 2(1)
- Fadilah. (2025). Pelaksanaan pelayanan kebidanan dan hukum di puskesmas pedesaan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan*, 9(2).
- Ferial, L. et al. (2022). Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Dengan Menerapkan Keselamatan Pasien di Puskesmas. *Journal of Baja Health Science*, 2(01)
- Hanafi, D., Asril, J., & Pranadita, N. (2025). Legal Protection for Midwives Providing First Aid in Emergency Situations Based on Law Number 17 of 2023 Concerning Health. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, 13(02).
- Handayani. (2024). Efektivitas standar profesi dalam melindungi praktik bidan. *Jurnal Etika Kesehatan dan Hukum*, 6(1)
- Hartoyo, M. G. et al. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengembangan Kualitas Tenaga Bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1)

- Hartati, Muhtazib, Rosnida, & Wahdaniyah, M. (2023). Pelindungan hukum bagi pasien dan bidan dalam pemberian pelayanan umum di TPMB. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.21872>
- Harun, F. S. et al. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Berita Kesehatan*, 18(1)
- Heryani, R. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2)
- Holijah, L., Yulianty, L., Alki, A., Sulaida, S., Siska, D., & Ratmat, S. (2023). Etika antar tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2), 131–137. <https://doi.org/10.52235/lp.v4i2.249>
- Kholifatin, R., Adianto, H., & Jaeni, A. (2024). Analisis yuridis pelindungan hukum terhadap praktik pelayanan kebidanan dalam pemberian asuhan di rumah sakit. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(5). <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i5.496>
- Kusumaningsih, R. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Mental. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1)
- Komalawati, V. et al. (2022). Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2)
- Lestari, R. D. (2023). Rekonstruksi Regulasi Hukum Bagi Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung,
- Mahaputri, A. A. I., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 277–281. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum%0A>
- Marzuq, N. H., & Andriani, H. (2022). Hubungan service quality terhadap kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan: literature review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2)
- Mursita. (2022). Pertanggungjawaban pidana bidan dalam kasus kelalaian medis. *Jurnal Hukum Profesi Kesehatan*, 5(2).
- Noenik S, Kholifatul U, & Arkha R. (2024). Penegakan Hukum Malpraktik Bidan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien, *Jurnal Hukum Kesehatan Soepra*, 10(1),

- Ontran, S. Fuad, F. & Edy, C. (2025). Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan dalam Menjamin Hak Setiap Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2 (2)
- Permatasari, G., & Setianingsih, F. (2024). Perlindungan hukum bidan dalam pelayanan kebidanan di praktik mandiri bidan Ani Dewi Satriani. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1339–1344. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i3.8268>
- Podungge, R., (2010). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualias Pelayanan Bidang Kesehatan*. *INOVASI*, 7(1)
- Purnomo, V. D., Putra, S., Hartini, M. I., & Kusumaningrum, A. E. (2024). Implementation of legal protection for the midwife profession in Indonesia. *Asian Journal of Healthcare Analytics*, 3(2), 93–104. <https://doi.org/10.55927/ajha.v3i2.11943>
- Rahman, D. N. (2023). Penyuluhan Hukum Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Tindakan Kedaruratan di Puskesmas Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. *ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1)
- Rahman, R. (2025). Aksesibilitas, Ketersediaan Tenaga Kerja, dan Ketersediaan Fasilitas Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Wilayah Pesisir. *Jurnal Kendari Kesehatan Masyarakat*, 4(3)
- Ramadhan, F., Muhafidin, D., & Miradhia, D. (2021). Kualitas pelayanan kesehatan puskesmas ibun kabupaten bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 12(2), 58-63.
- Relita Fitri, S., & Hoesein, Z. A. (2025). Urgensi pembaharuan hukum dalam tenaga kesehatan sebagai tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Retentum*, 5(1), 169–187.
- Rezky Fransilya Sumbung. (2021). Pelindungan hukum bagi bidan praktik mandiri dalam menjalankan praktik kebidanan. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1(September), 64–72. <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.15>
- Sari. Rosalia, N. Lilis, S. (2024). "Gambaran Inspeksi Kesehatan Lingkungan Puskesmas di Puskesmas Gading, Kota Surabaya Tahun 2023." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(5).
- Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis yuridis kebaruan tenaga kerja kesehatan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2441–2452.
- Sundari. (2020). Analisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. *Jurnal Etika dan Hukum Medis*, 4(1)

Suryono. (2020). Hak pasien dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 8(2)

Sulung, N. et al. (2022). Analisis Faktor Penatalaksanaan Kebutuhan Tenaga Fungsional Bidan Terhadap Pelayanan Kebidanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. *Human Care Journal*, 7(1)

Tampubolon, N. (2022). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1)

Tungga, B. D. (2023). Peranan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Disahkannya Omnibus Law Tentang Kesehatan. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2)

Yuliana. (2022). Aspek hukum pelayanan kesehatan primer oleh bidan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Kesehatan*, 7(1)

Wulan Yulianik Mulyowati, C., & Winarsih, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Bidan Di Klinik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kebidanan. *Justicia Journal*, 13(1)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.

Peraturan Bupati Kudus. (2020). *Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus*.

Peraturan Bupati Kudus. (2023). *Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana*

*Teknis Daerah Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kudus.*

